

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

Bab.I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab.II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1. Ekonomi Makro
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab.III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2. Hasil Pergeseran Target Kinerja Keuangan akibat Covid-19
	3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab.IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
	4.4.1 Kas dan setara kas
	4.4.2 Persediaan
	4.4.3 Aset Tetap
	4.4.4 Aset Lain-lain
	4.4.5 Belanja dan Beban
Bab.V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
	5.1.1. Belanja
	5.2. Pos-pos Neraca
	5.2.1. Aset
	5.2.2. Kewajiban
	5.2.3. Ekuitas
	5.3 Pos-pos Laporan Operasional
	5.3.1 Beban

5.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

5.4.2 Perubahan Ekuitas

5.4.3 Ekuitas Akhir

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Laporan Keuangan Tahun 2023

Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- (m) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (n) Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hasil Pergeseran Target Kinerja Keuangan akibat Covid-19
- 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Ringkasan Penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 4.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.4.2 Persediaan
 - 4.4.3 Aset tetap
 - 4.4.4 Aset Lain-lain
 - 4.4.5 Belanja dan Heban

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Pos-pos laporan realisasi anggaran
 - 5.1.1 Belanja
- 5.2. Pos-pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3. Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Beban
- 5.4. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Ekuitas Awal
 - 5.4.2 Perubahan Ekuitas
 - 5.4.3 Ekuitas Akhir

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Denpasar serta mewujudkan Rencana Kerja telah menetapkan Visi yaitu " Mewujudkan Masyarakat Kota Denpasar yang aman, nyaman, aman dan tentram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya".

Visi ini mengacu pada Visi Pemerintah Kota Denpasar, melalui Visi ini di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar diharapkan mampu mengaplikasikan dalam Rencana Kerja.

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Denpasar pula menetapkan Misi, dimana Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Visi. Misi ini meliputi :

- a. Meningkatkan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Denpasar;
- b. Meningkatkan Hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota dengan Lembaga-lembaga sosial Kemasyarakatan yang ada;
- c. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Masyarakat Kota Denpasar;
- d. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Kota Denpasar yang mantap.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan anggaran pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berpedoman pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar TA 2023;
- b. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No.54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023;

Untuk kebijakan keuangan SKPD tertuang dalam bentuk Program dan Kegiatan SKPD yang merupakan rencana kerja yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Pengadaan Mebel
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya
20. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
21. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
22. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
23. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
24. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
25. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
26. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
27. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam APBD Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melaksanakan 6 (enam) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 32.782.371.544,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 32.507.774.768,-. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 31.578.472.450,- (96,33%) yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.087.782.680,- (84,51%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.164.612.770,- (95,06%), Belanja Hibah sebesar Rp. 19.082.285.000,- (100%). Sedangkan untuk fisik ditargetkan 100% tercapai sebesar 96,33%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pada bagian ini akan diuraikan realisasi dan rencana kinerja keuangan, perbandingan realisasi antar periode dan derajat kemandirian Pemerintah Kota Denpasar. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Denpasar dari waktu ke waktu.

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel
Anggaran dan Realisasi APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2023 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi
1	Pendapatan		
2	Belanja	32.782.371.544,-	31.578.472.450,-
	Surplus/Defisit (I)		
3	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan		
	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Netto (II)		
	SILPA (I + II)		

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sesuai dengan urusan, bidang dan fungsi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Anggaran Tahun 2023	Realisasi		%
			Jumlah	Lebih / Kurang	
	Sub Kegiatan				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.883.780.600	4.084.782.680	748.997.920	84,51

2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	-	100
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.715.799	4.715.799	-	100
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.326.940	62.816.420	4.510.520	93,30
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.698.356	13.693.106	5.250	99,96
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.349.984	12.349.784	200	100
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.520.000	11.520.000	-	100
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	5.400.000	-	100
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.935.000	89.165.772	37.769.228	70,25
10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.779.134	4.779.134	-	100
11.	Pengadaan Mebel	4.561.538	4.500.000	61.538	98,65
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.035.238	239.292.000	30.743.238	88,62
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.602.670	32.546.698	55.972	98,29
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	116.696.248	110.253.242	6.443.006	94,48
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.222.360.089	1.222.360.089	-	100
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	216.590.000	195.165.080	21.424.920	90,11
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.300.000	52.123.285	176.715	99,66
18.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	84.218.950	781.050	99,08
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	10.000.000	9.950.000	50.000	99,50
20.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	584.986.152	584.986.152	-	100

21.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.864.460.108	3.838.190.038	26.270.070	99,32
22.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.319.829.961	19.317.251.287	2.578.674	99,99
23.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	438.741.722	432.152.929	6.588.793	98,50
24.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	672.264.070	612.475.070	59.789.000	91,11
25.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	58.001.340	58.001.340	-	100
26.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	310.362.511	307.662.511	2.700.000	99,13
27.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	440.074.084	185.121.084	254.953.000	42,07
JUMLAH		32.782.371.544	31.578.472.450	1.203.899.094	96,33

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kesbangpol Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Basis Akrual (*accrual basis*) untuk Penyusunan Neraca

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

4.4.1 Kas dan Setara Kas

4.4.2 Persediaan

4.4.3 Aset tetap

4.4.4 Aset Lain-lain

4.4.5 Belanja dan beban

4.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening

Laporan Keuangan Tahun 2023

Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

4.3.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.

4.3.2. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya termasuk juga didalamnya aset tak berwujud yang juga mengalami penyusutan (Amortisasi). Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya,

maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

4.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

4.4.1. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar berupa Software. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

4.4.2 Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

4.5 Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Belanja daerah dengan target anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 32.782.371.544,- realisasinya sebesar Rp.31.578.472.450,- atau 96,33% sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.11.070.616.247,-

Rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	
			Jumlah	Bobot (%)
1	BELANJA PEGAWAI	4,833,780,600.00	4,087,782,680.00	84.57
2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,588,709,168.00	8,164,612,770.00	95.06
3	BELANJA HIBAH	19,082,285,000.00	19,082,285,000.00	100.00
4	BELANJA MODAL	274,596,776.00	243,792,000.00	0.00
	Jumlah	32,779,371,544.00	31,578,472,450.00	96,33

Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.4.836.780.600,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 4.087.782.680,- atau 84,51% sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 4.367.892.995,-.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	%
	Belanja Pegawai			
1	Gaji dan Tunjangan	1,980,721,600.00	1,714,503,996.00	86.56
2	Tambahan Penghasilan PNS	2,853,059,000.00	2,370,278,684.00	83.08
3	Honorarium PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
	Jumlah Belanja Pegawai	4,836,780,600.00	4,087,782,680.00	84.51

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.8.588.709.168,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 8.164.612.770,- atau 95.06%. sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp.4.653.248.712,-

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		Setelah Perubahan		
1	Belanja Barang Pakai Habis	2,627,901,766	2,570,296,741	97.81
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	26,745,065	25,820,000	96.54
3	Belanja Jasa Kantor	2,598,581,248	2,554,843,242	98.32
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65,260,089	65,260,089	100.00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	163,144,000	130,000,000	79.68
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	492,800,000	492,800,000	100.00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72,280,000	70,343,950	97.32
8	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85,000,000	84,218,950	99.08
9	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9,000,000	8,889,415	98.77
10	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30,000,000	29,950,000	99.83
11	Belanja Perjalanan Dinas	1,350,974,000	1,068,756,399	79.11
12	Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,067,023,000	1,063,433,984	99.66
	Jumlah	8,588,709,168	8,164,612,770	95.06

1.3) Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan target anggaran Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp 19.082.285.000,- realisasi pengeluaran sebesar Rp 19.082.285.000,- atau 100%. Sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp 2.049.474.540,-

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	%
	Belanja Hibah			
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Berbadan Hukum Indonesia	17,477,200,000.00	17,477,200,000.00	100.00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,605,085,000.00	1,605,085,000.00	100.00
	Jumlah Belanja Pegawai	19,082,285,000.00	19,082,285,000.00	100.00

a). Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran Tahun 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 274.596.776,- dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 243.792.000,- Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal secara keseluruhan.

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	Bobot (%)
			Jumlah	
1	Belanja Tanah	-	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	274.596.776	243.792.000	88,78
3	Belanja Gedung	-	-	
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	
	Jumlah	-	-	

b). Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp. 30.420.790,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per tanggal 28 Desember 2023 yang disetor ke Kas Daerah.

c). **Persediaan** **Rp. 720.227,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai dan yang ada pada semua SKPD per 31 Desember 2023.

d). **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. Nihil dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. Nihil Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal secara keseluruhan.

5.2 Pos-pos Neraca

5.2.1 ASET

Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar terdiri dari Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya.

a.	Peralatan dan Mesin	3.596.782.448,84
	1 Alat-alat Besar	0
	2 Alat-alat Angkutan	1.501.116.720
	3 Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
	4 Alat Pertanian	55.873.800
	5 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	243.785.400
	6 Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.195.481.128,84
	7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.995.700
	8 Alat Laboratorium	29.708.000
	9 Komputer	560.821.700
	10	
b.	Gedung dan Bangunan	3.270.874.000
	1 Bangunan Gedung	3.270.874.000
	2 Monumen	-
c.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	1 Jalan dan Jembatan	-
	2 Bangunan Air/Irigasi	-
	3 Instalasi	-
	4 Jaringan	-
d.	Aset Tetap Lainnya	914.322.971
	1 Buku dan Perpustakaan	1.447.065
	2 Barang Bercorak Kebudayaan	602.771.160
	3 Hewan dan Ternak serta Tanaman	14.877.500
	4 Aset Renovasi	295.227.246
e.	Aset Lainnya	420.998.000
	1 Aset Kondisi Rusak Berat	
	2 Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-
	3 Aset Tidak Berwujud	78.550.000
D.	Aset Lain-Lain	
	Aset Lain-Lain	342.448.000

Dari data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp 3.636.875.448,84,-dan terdapat belanja modal senilai Rp. 243.792.000, kemudian terdapat reklas dari peralatan dan mesin ke aset lain-lain sebesar Rp 283.885.000 sehingga saldo akhir peralatan dan mesin Rp 3.596.782.448,84,-.

2. Aset Lainnya

Saldo awal sebesar Rp 63.563.000,-,- terdapat mutasi tambah reklas dari KIB B/peralatan dan mesin sebesar Rp 283.885.000,- dan penghapusan sesuai SK Walikota No: 188.4/6326/BPKAD/2023 sebesar Rp 5.000.000,- sehingga saldo aset lainnya sebesar Rp 342.448.000,-.

3. Gedung dan Bangunan

Terdapat penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari kantor KPU Kota Denpasar sebesar Rp. 3.270.674.000,-.

5.2.2 Aset Rusak Berat

Peralatan dan Mesin yang kondisinya Rusak Berat (RB) sebesar Rp. 283.885.000,- tidak masih tercatat sebagai aset peralatan mesin pada neraca tetapi sudah tercatat sebagai aset lain-lain pada neraca.

5.2.3 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya dari Kas Umum Daerah (LS) atas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Berikut merupakan penjelasan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca dengan rincian kewajiban sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Belanja Telepon	265,882.00	270,680.00
2	Utang Belanja Air	1,199,500.00	786,400.00
3	Utang Belanja Listrik	3,896,123.00	3,671,785.00
	Jumlah	5,361,505.00	4,728,865.00

5.2.4 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

Berikut ini merupakan penjelasan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Ekuitas	2.768.010.330	2.712.259.719

1.2 Pos-Pos Laporan Operasional

1.2.1 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan perhitungan beban operasional selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Pegawai	4,087,682,780.00	4,366,268,441.00
2	Beban Barang dan Jasa	8,165,128,183.00	4,672,639,586.00
3	Beban Hibah	19,082,285,000.00	2,049,474,540.00
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(171,538,928.00)	492,430,799.84
5	Beban Penyusutan Peralatan Gedung dan Bangunan	65,417,480.00	806,815,587.00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14,762,424.00	163,509,373.00
7	Beban Penyusutan Amortisasi ATB	-	-
8	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	278,885,000.00	5,344,167.00
	Jumlah	31,522,621,939.00	12,556,482,493.84

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sesuai SAP berbasis AkruaI yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang di tetapkan dalam APBD.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Denpasar**



Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja,SE
Nip. 19720313 199603 1 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	(%)	Realisasi Audited TA 2022 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	-	-	-
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	-
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-
4.2.01.01.05	Dana Alokasi Khusus Pemangasan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	-	-	-	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	-	-	-	-
	Jumlah Dana Desa	-	-	-	-
4.2.01.06	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
4.2.01.06.01	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
	Total Pendapatan Transfer	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	32,782,371,544.00	31,578,472,450.00	96.33	11,070,616,247.00
5.1	BELANJA OPERASI	32,507,774,768.00	31,334,680,450.00	96.39	11,070,616,247.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,836,780,600.00	4,087,782,680.00	84.51	4,367,892,995.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,588,709,168.00	8,164,612,770.00	95.06	4,653,248,712.00
5.1.05	Belanja Hibah	19,082,285,000.00	19,082,285,000.00	100.00	2,049,474,540.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	32,507,774,768.00	31,334,680,450.00	96.39	11,070,616,247.00

NO. URUT	URAIAN	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	(%)	Realisasi Audited TA 2022 (Rp)
5.2	BELANJA MODAL	274,596,776.00	243,792,000.00	-	-
5.2.01	Belanja Tanah			-	-
5.2.02	Belanja Perbaikan dan Mesin	274,596,776.00	243,792,000.00	88.78	-
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringin				
5.2.05	Belanja Asut Tetap Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	274,596,776.00	243,792,000.00	-	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	-
5.3.01	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil			-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan			-	-
	Jumlah Belanja Transfer	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	32,782,371,544.00	31,578,472,450.00	96.33	11,070,616,247.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32,782,371,544.00)	(31,578,472,450.00)	96.33	(11,070,616,247.00)
6	PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat			-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)	(32,782,371,544.00)	(31,578,472,450.00)	96.33	(11,070,616,247.00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



 Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kota Denpasar
 Pengada Anggaran
 A.A Nurrah Gede Darma Putra Atmadia SE
 NIP. 19720313 199603 1 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Audited TA 2022 (Rp)	Kontribusi (Pencapaian)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH				
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil (DBH)				
Dana Alokasi Umum (DAU)				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Dana Insentif Daerah				
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - DID				
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Pemerintah/Undang-undang				
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
JUMLAH PENDAPATAN				
BERAN DAERAH				
BERAN				
Beban Pegawai	31.522.721.839,00	12.556.482.493,84	18.966.239.345,16	151,05
Beban Pegawai	4.057.787.880,00	4.536.268.441,00	(278.485.761,00)	(6,38)
Beban Bangun dan Jasa	8.163.128.183,00	4.672.029.586,00	3.491.098.597,00	74,74
Beban Bangun				
Beban Subsidi				
Beban Hibah	19.682.285.000,00	2.039.474.540,00	17.642.810.460,00	
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyelesaian Piutang				
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.525.926,00	1.458.099.926,84	(1.270.573.950,84)	
Beban Penyusutan Perbaikan dan Mesin	(17.316.320,00)	403.430.398,81	(603.969.727,84)	(134,89)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	65.472.480,00	805.669.527,00		
Beban Penyusutan Jalan, Bangunan dan Jembatan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.745.476,00	163.579.477,00	(148.744.041,00)	(180,27)
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset Lainnya	278.885.000,00	3.544.157,00	275.340.843,00	3.118,40
Beban Transfer				
Beban Hibah Dana				
Beban Bantuan Keuangan				
JUMLAH BEBAN	31.522.721.839,00	12.556.482.493,84	18.966.239.345,16	151,05
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	(31.522.721.839,00)	(12.556.482.493,84)	(18.966.239.345,16)	151,05
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertanahan/Pelaksanaan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertanahan/Pelaksanaan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(31.522.721.839,00)	(12.556.482.493,84)	(18.966.239.345,16)	151,05
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT - LO	(31.522.721.839,00)	(12.556.482.493,84)	(18.966.239.345,16)	151,05

Catatan: Data Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023 (Rp)	Realisasi Audited TA 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2,712,259,719.00	577,456,245.84
Surplus (Defisit) LO	(31,522,721,839.00)	(12,556,482,493.84)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Aset Tetap Tanah		
Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan		
Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan		
Koreksi Aset Tetap Lainnya		
Koreksi KDP		
Koreksi Aset Lain-Lain		
Koreksi Aset Tak Berwujud		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
Koreksi Pendapatan Pajak Daerah		
Koreksi Denda Pajak		
Koreksi Dana Bergulir		
Koreksi Hutang Belanja Modal		
Koreksi Hutang Belanja Transfer		
Koreksi Barang Masuk Antar OPD		3,620,669,720.00
Koreksi Barang Keluar Antar OPD		
RK PPKD	31,578,472,450.00	11,070,616,247.00
Ekuitas Akhir	2,768,010,330.00	2,712,259,719.00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Denpasar
Pegguna Anggaran


A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
Nip. 19720313 199603 1 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

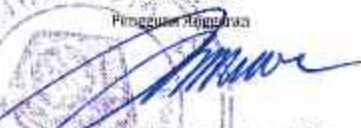
(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
ASET	2,773,371,835.00	2,716,988,584.00
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Persediaan	720,227.00	603,000.00
Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Abit Listrik	-	-
Abit Tulis Kantor	540,227.00	378,000.00
Benda Pos	180,000.00	-
Bahan Cetak	-	-
Bahan Komputer	-	225,000.00
Peralat Kantor (Bahan Pembersih)	-	-
Abit/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
Jumlah Aset Lancar	720,227.00	603,000.00
Aset Tetap		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	3,596,782,448.84	3,636,875,448.84
Gedung dan Bangunan	3,270,874,000.00	3,270,874,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	914,322,971.00	914,322,971.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5,024,286,711.84)	(5,120,645,735.84)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,782,488,063.84)	(3,459,026,991.84)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(872,233,067.00)	(806,815,587.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(869,565,581.00)	(854,803,157.00)
Jumlah Aset Tetap	2,757,692,708.00	2,701,426,684.00
Aset Lainnya		
Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-
Aset Lain-lain	342,448,000.00	63,563,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(327,489,100.00)	(48,604,100.00)
Aset Tak Berwujud	78,550,000.00	78,550,000.00
Amortisasi ATB	(78,550,000.00)	(78,550,000.00)
Jumlah Aset Lainnya	14,958,900.00	14,958,900.00
JUMLAH ASET	2,773,371,835.00	2,716,988,584.00
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Belanja	-	-
Utang Belanja Pegawai	-	-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN dan BPJS TPP 4%	-	-
Utang Belanja Barang/Jasa	5,361,505.00	4,728,865.00
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	265,882.00	-
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	3,896,123.00	-
Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	1,199,500.00	-
Utang Belanja Honorarium Non ASN	-	-
Utang Belanja Persediaan	-	-
Utang Belanja Hibah	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5,361,505.00	4,728,865.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5,361,505.00	4,728,865.00

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
EKUITAS DANA		
Ekuitas	2.768,010,330.00	2.712,259,719.00
JUMLAH EKUITAS	2.768,010,330.00	2.712,259,719.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.773,371,835.00	2.716,988,584.00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



A.A. Baturah Gede Darma Putra Armadia, SE
Nip. 19720313 195603 1 002



LAMPIRAN

**SALDO KAS DI PEMEGANG KAS (BENDAHARAWAN)
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PER 31 Desember 2023**

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sisa Kas UP Bendahara Pengeluaran	30,420,790	Disetor ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2023
	JUMLAH	30,420,790	



Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran

A.A.Ngurah Gede Darma Putra Atmadia,SE
Nip. 19720313 199603 1 002

ASET LAINNYA

UNIT : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

	SALDO AWAL 31/12'22	PENAMBAHAN 1/1'23 S/D 31/12'23	PENGURANGAN 1/1'23 S/D 31/12'23	AMORTISASI	PENYUSUTAN	SALDO AKHIR 31/12'22
Asuransi	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Salak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	78,550,000			78,550,000		0
	63,563,000	283,885,000	5,000,000		327,489,100	14,958,900
II	142,113,000	283,885,000	5,000,000	78,550,000	327,489,100	14,958,900

ASET TETAP

UNIT : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

	SALDO AWAL 31/12'22	PENAMBAHAN 1/1'23 S/D 31/12'23	PENGURANGAN 1/1'23 S/D 31/12'23	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR 31/12'23
	3,636,875,448.84	243,792,000	283,885,000	3,282,488,063.84	314,294,385.00
	3,270,874,000	-	-	872,233,067	2,398,640,933.00
	914,322,971	-	-	869,565,581.00	44,757,390.00
	7,822,072,419.84	243,792,000	283,885,000	5,024,286,711.84	2,757,692,708.00


 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Denpasar
 Pengguna Anggaran
 A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
 Nip. 19720313 199603 1 002

Laporan Keuangan Tahun 2023

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
DAFTAR PERSEDIAAN / SISA BARANG
PER 31 DESEMBER 2023

A T K	NAMA/JENIS BARANG						JUMLAH
	ALAT KEBERSIHAN	Barang Cetakan	Alat Listrik dan Elektronik	Barang kuasi/ leges	Sparepart/ BBM	Bahan Komputer	
540,227	-	-	-	180,000	-	-	720,227



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran

A.A.Ngurah Gede Darma Putra Atmadja,SE
Nip. 19720313 199603 1 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN		% PENYELESAIAN	WAKTU	ANGGARAN	REALISASI	%
NO	NAMA	PEKERJAAN	PENYELESAIAN	(RP)	(RP)	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1 Tahun	4,833,780,600	4,084,782,680	84.50
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	100.00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1 Tahun	4,715,799	4,715,799	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1 Tahun	67,326,940	62,816,420	93.30
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1 Tahun	13,698,356	13,693,106	99.96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1 Tahun	12,349,984	12,349,784	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	1 Tahun	11,520,000	11,520,000	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	1 Tahun	5,400,000	5,400,000	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Tahun	126,935,000	89,165,722	70.25
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	1 Tahun	4,779,134	4,779,134	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Pengadaan Mebel	100%	1 Tahun	4,561,538	4,500,000	98.65
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1 Tahun	270,035,238	239,292,000	88.62
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Tahun	32,602,670	32,546,698	99.83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1 Tahun	116,696,248	110,253,242	94.48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1 Tahun	1,222,360,089	1,222,360,089	100.00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	1 Tahun	216,590,000	195,165,080	90.11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1 Tahun	52,300,000	52,123,285	99.66
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	1 Tahun	85,000,000	84,218,950	99.08
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	1 Tahun	10,000,000	9,950,000	99.50

7	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	1 Tahun	584,986,152	584,986,152	100.00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	100%	1 Tahun	3,864,460,108	3,838,190,038	99.32
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik					
8	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	100%	1 Tahun	19,319,829,961	19,317,251,287	99.99
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	1 Tahun	438,741,722	432,152,929	98.50
9	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	1 Tahun	672,264,070	612,475,070	91.11
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kwaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama	100%	1 Tahun	58,001,340	58,001,340	100.00

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	1 Tahun	310,362,511	307,662,511	99,13
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Tahun	440,074,084	185,121,084	42,07
JUMLAH			32,782,371,544	31,578,472,400	96,33

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



A.A Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
Nip. 19720313 199603 1 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2023

JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



A.A Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
Nip. 19720313 199603 1 002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
KEWAJIBAN KEPADA NEGARA (PAJAK)

PER 31 DESEMBER 2023

NO.	PAJAK	PUNGUT	SETOR	SISA YANG BELUM DISETOR	KETERANGAN TGL DISETOR
1	Belanja Langsung				
	- PPh pasal 21	92,402,246	92,402,246	NIHIL	
	- PPh pasal 22	26,101,459	26,101,459	NIHIL	
	- PPh pasal 23	37,640,246	37,640,246	NIHIL	
	- PPN	373,026,055	373,026,055	NIHIL	
	JUMLAH	529,170,006	529,170,006	-	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



A.A Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
Nip. 19720313 199603 1 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DANA BERGULIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
Per 31 DESEMBER 2023

Program	APBN			APBD		
	Awal /	Perkembangan	Akhir /	Awal /	Perkembangan	Akhir /
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	1	2	3 = 1 + 2	1	2	3 = 1 + 2
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL


 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Denpasar
 Pengguna Anggaran

 A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
 Nip. 19720313 199603 1 002

BELANJA MODAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN (JENIS BARANG)	VOL / LUAS / JUMLAH BARANG	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
	-	-	-	
n Mesin	-	-	-	
	2	buah	4,500,000	
et	2	unit	3,400,000	
t	1	unit	8,600,000	
	5	unit	65,000,000	
sonic Standar	4	unit	70,000,000	
	1	unit	30,000,000	
	1	unit	5,627,000	
em	1	unit	2,630,000	
	1	unit	4,050,000	
	3	unit	44,985,000	
ner	1	unit	5,000,000	
Bangunan				
ator	-	-	-	
dan Jaringan	-	-	-	
lainnya :	-	-	-	
alam Pengerjaan	-	-	-	
JUMLAH	0	UNIT	243,792,000	NIHIL

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar
Pengguna Anggaran

A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, SE
Nip. 19720313 199603 1 002